



Final Exam 2018

Digital Economics (ECEU602308)

Instructor: Ibrahim Kholilul Rohman

Thursday, December 20, 2018

Time: 48 hours (take home)

Instructions

- You might answer this exam in Bahasa Indonesia or English, but please do not mix except for technical terms.
- You will get a higher mark if you can contribute to the discourse with: (i) theoretical aspects on digital economics discussed during the class, (ii) the empirical data to support your analysis, (iii) your creativity to go beyond lecturing materials using additional references and evidence-based analysis.
- The empirical data might be based on (but not limited to): Bank of America Merrill Lynch- Telecommunications Matrix, JRC PREDICT, JRC Research and Development Scoreboard, WDR- the World Bank and BPS data.
- There is no limitation on the number of words but typically it is between 900-1000 words per-question.
- The deadline to hand-in the exam is at **9am on Saturday, December 22, 2018 to be sent to the following email address: Ibrahim.rohman@gmail.com (put **ekdig_Nomor Mahasiswa_NomorAbsen, in the email subject**). If you prefer to hand-in the paper physically, please do so by contacting the Program Administrator at the Department.**
- Discussion between students is strongly encouraged but copying and pasting are violating the rule and thus **students are strictly prohibited to do so.**

**

Questions 1: How do you assess the remarks made by Minister Soemarno on the following issues regarding the infrastructure sharing? (20%)

Rabu, 23 Nov 2016 15:35 WIB

Menteri Rini: Ada Ketidakadilan dalam Network Sharing

Muhammad Idris - detiknet

Jakarta - Pasar operator seluler di luar Pulau Jawa sampai saat ini masih dikuasai Telkomsel. Dengan *market share* di atas 80%, anak usaha PT Telkom Tbk ini jauh mengungguli operator seluler lainnya. Sejumlah operator pun mendorong segera disahkannya regulasi *network sharing*.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengatakan ada ketidakadilan bagi Telkomsel lantaran anak usaha Telkom tersebut selama ini sudah berinvestasi tak sedikit, serta mengambil risiko yang besar ketika membangun infrastruktur di daerah pelosok.

"Sekarang permintaannya kita sudah membangun semua, ada yang mau minta *sharing*, kalau mau *sharing* tentu kita mempertanyakan. Waktu kita pertama kali mau bikin, risiko kita tinggi *loh, kok* mereka *nggak* mau bikin, dan risiko kita waktu itu tinggi karena namanya trafik masih rendah sekali," katanya ditemui di Suntec, Singapura, Rabu (23/11/2016).



"Nah, sekarang sudah ramai (pelanggan), *nggak* ada risiko, *kok* mereka minta *sharing*. Kalau kita bilang oke silakan kalau mau *sharing*, bagaimana ya, risiko yang dulu kita ambil dikalkulasi seperti apa," tambahnya lagi.

Mantan Presiden Direktur Astra Internasional ini berujar, Telkomsel yang jadi tulang punggung Telkom dalam pasar seluler sudah cukup berdarah-darah di awal merintis pembangunan infrastruktur, sehingga rasanya tak adil jika diwajibkan membagi infrastrukturnya.

"Indonesia kan memang sangat luas, jadi kita dalam hal ini seperti Telkom sendiri melakukan investasi sehubungan dengan *sub marine cable*, dan investasi untuk betul-betul membangun infrastruktur *backbone* di seluruh Indonesia. Itu kan bukan *cost* yang murah dan risiko tinggi," ungkap Rini.

Pihaknya, sambungnya, bukannya tidak sepakat dengan perubahan regulasi yang didorong oleh Menteri Komunikasi dan Informasi, Rudiantara, tersebut. Namun sebagai Menteri BUMN, ada pertimbangan lain untuk mempertahankan aset negara.

"Jadi kita berharap dalam hal ini kita harus betul-betul dikalkulasi *dong* investasi dan risiko yang diambil Telkom kalau memang ada *infrastructure sharing*. Jadi bukan kita minta *landscape* berubah," tandas Rini. **(rou/rou)**

end of question 1

Questions 2: How do you assess the remarks made by Minister Rudiantara on the following issues regarding regulation in the ICT industry? (20%)

Menkominfo: Semakin Sedikit Regulasi Semakin Bagus

Oleh : **Hariyanto** | Kamis, 15 Juni 2017 - 15:09 WIB

INDUSTRY.co.id - Jakarta- Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mengatakan semakin sedikit regulasi semakin bagus dalam pengembangan industri teknologi informasi dan komunikasi.

"Sekarang ke depannya semakin sedikit regulasi semakin bagus, 'the best regulation is the less regulation,' katanya dalam buka puasa bersama awak media di Kementerian Kominfo Jakarta, Rabu (14/6/2017) Ia menjelaskan sudah bukan saatnya lagi pemerintah mengatur secara detail. Pemerintah, menurut dia, memberikan koridor-koridor arah kebijakan bagi industri.

"Secara umum kita jangan menambah peraturan menteri kalau bisa mengurangi peraturan menteri, tetapi utamanya di arah kebijakan," katanya.

Ia mencontohkan tentang sektor e-commerce, di mana pemerintah tidak membuat kebijakan-kebijakan secara detail untuk mengatur misalnya sertifikasi, namun justru mendorong agar industri yang mengatur dirinya sendiri melalui akreditasi.

"Saya 'gak' pernah mau meregulasi itu, jangan regulasi ini besok berubah, memang saya yang paling tahu kan 'gak', tapi koridornya diberikan, mereka memerlukan regulasinya sendiri, itu yang namanya SRO, 'self regulation organization'," katanya.

Dalam buka puasa bersama tersebut, dihadiri jajaran para pemangku kepentingan sektor komunikasi dan informatika.

Buka puasa bersama juga dimeriahkan dengan nasyid serta pemberian santunan kepada anak-anak yatim.

Menteri Rudiantara dalam kesempatan tersebut menyumbang satu bulan gajinya untuk diberikan kepada anak-anak yatim.

end of question 2



Question 3: How do you assess the following report/news regarding CBDC?
(20%)

BI Buka Peluang Terbitkan Mata Uang Digital CBDC

NERACA
Berita Ekonomi Terkini Indonesia

Rabu 08 Agustus 2018 14:48 WIB

JAKARTA - Bank Indonesia (BI) mengatakan jika tren berbelanja melalui daring (e-Commerce) sudah sedemikian pesat, tidak tertutup kemungkinan mata uang digital resmi bank sentral atau Central Bank Digital Currency/CBDC bisa diterbitkan.

Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Erwin Haryono mengatakan perkembangan e-commerce menjadi salah satu indikator bagi BI untuk menerbitkan instrumen resmi mata uang krypto tersebut.

Saat ini, otoritas masih mengkaji dampak baik dan juga buruk jika CBDC diterbitkan di Indonesia. CBDC juga kini sedang didalami bank sentral di seluruh dunia, sebagai salah satu instrumen untuk mendukung pembayaran digital yang aman dan terawasi.

"Apabila kebutuhan uang digital itu dipenuhi oleh orang lain, dia tidak akan stabil. Itu harus dipenuhi oleh otoritas. Saat masyarakat butuh banyak uang digital, bank sentral harus masuk," ujar Erwin.

Namun, tidak hanya efisiensi dan juga efektivitas dari CBDC yang sedang dipikirkan Bank Sentral. Pasalnya, CBDC juga bisa membawa risiko bagi perekonomian. Jika tidak dipersiapkan dengan matang, penerbitan CBDC bisa menggerus peredaran uang kartal dan mengganggu likuiditas perekonomian.

"Bank bisa tergerus uangnya dan masuk lagi ke bank sentral. Ini masih dalam tahap tahap penelitian dan perkembangan," ujar dia.

CBDC akan menggunakan teknologi pencatatan transaksi terintegrasi modern (blockchain) sebagai platform. Teknologi "blockchain" ini pula yang saat ini digunakan oleh mata uang digital swasta seperti Bitcoin, Ethereum dan lainnya. BI mulai mengkaji penerbitan CBDC sejak 2017.

ADVERTISEMENT

Menurut keterangan Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Onny Widjanarko di waktu sebelumnya, proses kajian untuk menerbitkan CBDC akan selesai 2020. Sejak 2017 itu BI juga membandingkan



(benchmarking) dengan propyek percontohan mata uang digital seperti di Inggris, Singapura, Malaysia, dan Ekuador.

Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso menyatakan bahwa beberapa negara mulai mencoba menerapkan mata uang digital bank sentral (Central Bank Digital currency/CBDC) dan crypto fiat currency yang menggunakan blockchain. Hanya, di Indonesia hal ini masih harus dikaji.

"Untuk Indonesia yang berpenduduk besar yang tersebar di sekitar 17 ribu pulau, berkembangnya fintech dan digital payments yang andal harus terus kami dukung," ujar Wimboh.

Menurut Wimboh, penerapan CBDC harus tetap mempertahankan peran Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter dan sistem pembayaran. Aspek stabilitas sistem keuangan dan perlindungan konsumen juga tidak boleh dikesampingkan dalam penerapan CBDC.

Di satu sisi, ia menyadari bahwa penerapan CBDC akan menghemat banyak biaya di sistem pembayaran dan mempercepat peningkatan inklusi keuangan masyarakat. Hanya, dalam penerapannya perlu transisi bertahap dan paralel, serta mekanisme konversi yang jelas dan transparan. Begitu pula dari aspek legalitas juga perlu untuk disesuaikan.

Kabar baiknya, riset dari Angela Walch, Professor di St. Mary's University School of Law menunjukkan bahwa penyesuaian legalitas sistem pembayaran digital di negara yang pasarnya tengah berkembang (emerging market) relatif lebih mudah ketimbang Amerika Serikat (AS). Sebab, di negeri Paman Sam itu prosesnya lebih panjang.

Menurut Wimboh, kedua alat pembayaran itu perlu dikaji guna melengkapi ekosistem sistem pembayaran yang terintegrasi atau Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) yang baru saja dirilis oleh BI. Ia menegaskan, bahwa ia bersama Pemerintah, BI, akademisi, dan lembaga internasional berkomitmen menerapkan CBDC ke arah yang dikehendaki dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

(dni)

**end of question 3 **

Question 4: LISTEN to the following flash-report (<https://hbr.org/2016/04/the-flash-report-the-global-digital-economy>), share your views on what you agree or disagree on the talk made by Sarah Carmichael on global digital economy (20%)



The Flash Report: The Global Digital Economy

by Sarah Green Carmichael

APRIL 29, 2016

SAVE SHARE COMMENT 1 TEXT SIZE PRINT

As our economy has grown more global and more digital, businesses have had to shift their competitive strategies, marketing techniques, and business models. One of the most powerful changes? The rise of network effects. In this edition of the flash report, we talk about some of these big changes with Kerry Jones, a researcher for Fractl who has studied digital networks. She explains how network structure can shape marketing strategy, why network size may not matter as much as you think, and how marketers can use networks to create “the majority illusion”.

**end of question 4 **

Question 5: Prepare a short policy brief on what priorities and issues to tackle for Indonesia to embracing the competition in the digital industry. **As a point of departure,** you can take a look on how the digital economy and ICT sector has been growing in the region Asia based on PREDICT report and database (20%)

**end of question 5 **

Kanopi FEBUI
Unity in Development